



Pengaruh Alokasi Pro-Poor Budget Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Ditinjau dari Ekonomi Syariah

Siti Khuzaimah

SMK Putra Tama Mandiri, Indonesia

E-mail: khuzaimahpart2nd@gmail.com

ABSTRACT

Pro-Poor Budget is defined as a budget made to accommodate the interests of the poor. The pro-poor budget is philosophically relevant constitutionally. HDI as a measuring tool for development success has a very broad meaning in human life, reflecting the status of the ability of the human itself which is measured from three dimensions, namely: 1) a long and healthy life that measures life opportunities, 2) knowledgeable and skilled, and 3) access to the resources needed to achieve a decent standard of living. This study uses multiple linear regression analysis to determine the effect of direct expenditure on education (X1) and direct expenditure on health (X2) as Pro-Poor Budget on the Human Development Index (Y). The result is that the Banten Provincial Government's budget management policy is still not a pro-poor budget. Due to both the allocation of Direct Expenditure on Education and Direct Expenditure on Health, it still gets a very minimal portion. Based on the calculation of the partial regression (t test) and simultaneous (F test) Direct Expenditure on Education and Health has a significant effect on increasing HDI.

Keywords: Pro-Poor Budget, Mustadhafin, IPM

Pendahuluan

Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan...”. Sementara dalam pasal 26 ayat 1 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar...”. Dengan demikian dunia internasional mengakui bahwa hidup sejahtera, pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar manusia yang urgen dan harus terpenuhi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dalam pasal 28 C ayat 1 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia”.

Karenanya peran pendidikan menjadi sangat penting, selain merupakan hak dasar juga berpengaruh secara langsung terhadap kualitas dan kesejahteraan hidup seseorang. Pemenuhan pendidikan harus diutamakan dan menjadi fokus pemerintah terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Juga dipertegas kembali dalam pasal 34 ayat 2 bahwa: “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kemiskinan merupakan masalah terbesar dalam proses pembangunan. Kemiskinan sendiri tidak bisa hanya diukur melalui pendapatan suatu masyarakat, menurut Amartya Sen: “kemiskinan harus dilihat dari berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, demokrasi dan kebebasan masyarakat terhadap akses ekonomi.”

Di Indonesia sendiri sejak tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang No.32 tentang pemerintah daerah, dimana pada pasal 1 membahas mengenai desentralisasi dan perimbangan keuangan daerah. Memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya. Termasuk di dalamnya keleluasaan mengelola keuangan daerah sebagai modal utama pembangunan.

Dengan diberlakukannya desentralisasi dan perimbangan keuangan daerah serta diberikannya keleluasaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah seyogyanya proses pembangunan di daerah-daerah tentu lebih efektif dan maksimal karena pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan. Namun melihat perkembangan provinsi Banten setelah pembentukannya sekitar tahun 2000 lalu pengurangan jumlah penduduk miskin selama dalam rentang tahun 2009 sampai dengan 2012 rata-rata perubahan jumlah penduduk miskin hanya sekitar 0,68 % dari total penduduk (BPS Banten 2016). Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pemerintah provinsi Banten dalam penyelenggaraan pembangunan dan efisiensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu modal pembangunan masih belum maksimal.

Rasulullah s.a.w di awal pemerintahannya telah mencontohkan bagaimana seharusnya negara menanggulangi kemiskinan. Meletakkan dasar-dasar kebijakan keuangan negara yang mengutamakan kepentingan kaum miskin (*pro-poor*). Pada saat itu pendapatan negara yang masih relatif sangat kecil disebabkan hanya bersumber dari

penerimaan zakat saja yang baru diwajibkan pada tahun ke-2 hijriah. Meskipun demikian apa saja yang berhasil dikumpulkan kas negara/baitul al-mal selalu dibelanjakan untuk anggota masyarakat yang miskin.

Hans Antlov mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aliran kebijakan yang diperlukan untuk mengentaskan dan keluar dari kemiskinan:

Pertama adalah teori bahwa pertumbuhan ekonomi sendiri akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan membantu rakyat mengatasi kemiskinan mereka dalam kurung *pro growth*. Lapangan pekerjaan menjadi jalan keluar utama dari kemiskinan, yang hanya dapat diciptakan melalui pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan ini dengan demikian memfokuskan diri pada liberalisasi pertumbuhan ekonomi, dengan membiarkan pasar mengurus pengentasan kemiskinan. Kedua tentang pengentasan kemiskinan didasarkan pada kebijakan *pro poor* yang peka terhadap perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini berargumentasi bahwa pasar tidaklah netral atau adil bagi semua. Kekuatan-kekuatan pasar dapat menciptakan marjinalisasi dan ketidaksetaraan yang lebih parah. Kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat tetap berada di luar atau termarginalisasikan oleh proses pertumbuhan. Tidak semua orang berangkat dari titik tolak yang sama dalam kehidupannya dan keadaan hidupnya akan mempengaruhi peruntungan dan kekayaan (atau ketiadaan kekayaan tersebut). Kemudian jalan alternatif ketiga adalah kebijakan yang memfokuskan diri secara langsung pada upaya mempertahankan pertumbuhan, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan penghasilan kaum miskin melalui intervensi kebijakan yang eksplisit terhadap proses pertumbuhan. Atau dengan kata lain kebijakan pertumbuhan yang *pro-poor* (*pro-poor growth*), dikarenakan agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai pengentasan kemiskinan maka reformasi sosial terutama program-program pemberdayaan dan perbaikan pendidikan dan kesehatan masyarakat harus mendahului reformasi ekonomi. Pasar tidak dapat melakukan hal ini dengan sendirinya. Hans Antlov memaparkan bahwa “diperlukan peran negara yang memiliki kemauan untuk membatasi kekuasaan pasar dan mengalokasikan dana publik kepada kaum miskin”.

Sedangkan Islam sendiri memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural, karena Allah SWT telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan-Nya. Begitupun dengan berbagai prinsip-prinsip yang terkait dengan kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan. Di mana Islam sendiri mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya oleh United National Development Programme (UNDP) digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Alokasi Pro-Poor Budget terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Ditinjau dari Ekonomi Syariah”.

Tinjauan Pustaka

Sejumlah referensi memberikan definisi beragam mengenai anggaran pro rakyat miskin (pro poor budget) karena memang belum ada definisi baku mengenai pro poor budget. Namun menurut Antonio Pradjasto Hardjo secara konseptual, pro poor budget bisa didefinisikan sebagai tindakan politik yang bertujuan untuk mengalokasikan hak-hak dan sumberdaya kepada individu, organisasi dan wilayah yang terpinggirkan oleh pasar dan negara. Secara sederhana pro poor budget didefinisikan sebagai anggaran yang dibuat untuk mengakomodasi kepentingan kelompok miskin (Manan & Maftuchan 2010).

Dalam kajian akademis, anggaran sendiri memiliki fungsi administrasi dan ekonomi. Secara administrasi, anggaran merupakan pedoman pengelolaan sumber daya bagi pemerintah terutama perencanaan program dan pengelolaan keuangan untuk suatu periode tertentu. Anggaran juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain, anggaran merupakan alat utama publik untuk melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah karena memberikan informasi mengenai tujuan, hasil, dampak dan kelompok sasaran dari program yang tersusun.

Selain fungsi administrasi anggaran (anggaran negara) memiliki beberapa fungsi ekonomi yaitu: *Pertama*, fungsi alokasi. Anggaran merupakan instrumen pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kacamata fungsi alokasi, maka anggaran seringkali dibedakan antara belanja pegawai, belanja pembangunan atau belanja publik. *Kedua*, fungsi distribusi. Anggaran merupakan sebuah instrumen untuk membagi sumber daya dan manfaatnya kepada publik secara adil dan merata. Hal ini untuk mengatasi kesenjangan antara kota dan desa, miskin dan kaya, serta kelompok kepentingan yang berbeda. *Ketiga*, fungsi stabilisasi. Penerimaan dan pengeluaran negara tentu mempengaruhi permintaan agregat dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dengan fungsi ini, maka anggaran menjadi instrumen untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi.

Anggaran pro poor secara filosofis relevan secara konstitusional. Karena konstitusi secara jelas memberikan amanat terhadap negara untuk menjalankan fungsi-fungsi yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan keamanan dan perdamaian, menjamin hak-hak dasar warga negara, dan memberikan perlindungan kepada fakir miskin. Sejumlah undang-undang turunan dari konstitusi tentu juga member amanat pada hal-hal baik yang dicita-citakan para pendiri bangsa, termasuk regulasi dan desentralisasi dan otonomi daerah, yang di dalamnya secara tegas membawa amanat dan tujuan kesejahteraan rakyat, dengan disertai prinsip-prinsip dasar demokrasi, akuntabilitas, transparansi, dan pemberdayaan rakyat.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dimana tidak tercapainya kehidupan layak dengan penghasilan US\$ 1. Di Indonesia sendiri ukuran untuk menentukan kemiskinan berdasarkan pada pola konsumsi 2.100 kalori, jika dinilai dengan jumlah uang 2.100 kalori setara dengan US\$ 1,5. Atau secara sederhana kemiskinan dapat dipahami sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sementara United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berlindung, ketidak mampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak memiliki pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidak mampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, tidak ada keterwakilan dan kebebasan (Daryanto, 2010).

Manan dan Maftuchan (2010) berpendapat bahwa salah satu tolak ukur yang dapat mencerminkan apakah kebijakan pemerintah telah pro-poor atau sebaliknya

adalah tentang belanja negara (atau pada tataran APBD dikenal dengan belanja daerah), yang di dalamnya terdiri dari belanja modal dan belanja sosial. Belanja modal adalah instrumen penting pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian. Stimulus fiskal dapat membuat pertumbuhan yang tinggi, sehingga memberi kesempatan kerja yang tinggi, dan menciptakan kesempatan kerja yang maksimal bagi rakyat. Stimulus fiskal yang tepat juga berfungsi memicu pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang vital bagi kelompok miskin, sehingga menciptakan pertumbuhan yang berkualitas atau pertumbuhan yang berpihak pada kelompok miskin.

Suatu sistem ekonomi harus menaruh perhatian istimewa pada sektor publik serta institusi-institusi yang tepat yang berfungsi mengatur kegiatan ekonomi secara efisien dan serta mendistribusikan secara adil keuntungan-keuntungan ekonomi yang dicapai.

Menurut Prasetyo (2002) etika penghormatan pada kaum tertindas dalam Islam menempati posisi teratas bahkan suatu amalan bisa gugur jika ada perbuatan yang menyakiti budak. Bukan hanya perlindungan terhadap budak, kesewenang-wenangan terhadap anak yatim dan kaum miskin sering dikaitkan dengan perbuatan mendustakan agama, seperti yang tercermin dalam surat Al-Ma'un. Setidaknya ada tiga alasan mengapa keberpihakan terhadap kaum miskin (pro-poor) menjadi prioritas utama; 1) Kemiskinan sangat berlawanan dengan misi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Kemiskinan merupakan ekspresi kehidupan yang kalah serta tertindas. 2). Kemiskinan sangat bertentangan dengan martabat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia dan dimuliakan. Kemiskinan menjatuhkan martabat manusia sebagai sosok yang bebas serta merdeka. 3). Yang paling utama adalah mandat Al-Quran yang meletakkan prinsip utama keadilan sebagai kunci ketaqwaan yang sejati dan sempurna.

Pendekatan yang dipakai Al-Quran untuk menggambarkan para penguasa, pemimpin dan mereka yang ada di atas sebagai mustakbirin berarti sombong, mabuk kekuasaan dan menyebut rakyat jelata atau masyarakat awam dengan mustadh'afin yang berarti lemah dan tertindas (Badruzzaman, 2008).

Adapun Al-Quran dengan jelas dan tanpa ragu-ragu berdiri di pihak golongan masyarakat lemah dalam menghadapi penindasan. Al-Quran menyesalkan, bahkan menegur orang-orang yang tidak mau menolong mereka yang teraniaya dalam surat An-Nisa ayat 75.

Selain menyatakan keberpihakan terhadap mustadh'afin (yang meliputi kaum fakir dan miskin), Islam sendiri memiliki prinsip-prinsip strategi penanggulangan kemiskinan terkait dengan kebijakan publik yang dapat dijadikan acuan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja (Yuli, 2013).

Dengan demikian Islam menggambarkan bahwa peran utama pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah memastikan terpenuhinya hak-hak dasar kaum mustadh'afin (miskin) melalui akses terhadap sarana publik dan politik guna mencapai standar hidup layak dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

Pelaksanaan pembangunan seutuhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan. Dalam kerangka ini maka pembangunan ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan.

Perubahan dalam indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu: indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. Oleh karena itu, perubahan dalam IPM terkait erat dengan perubahan ketiga indeks tersebut. Dalam perhitungan indeks kesehatan, digunakan angka harapan hidup sebagai indikator.

Dengan demikian IPM suatu daerah merupakan wajah jujur dari proses upaya pembangunan yang dilakukan. Dalam upaya tercapainya tujuan pembangunan sejatinya tidak selalu melalui ditentukan oleh pembentukan modal manusia (Capital Human).

Fukuyama (2010) berpendapat bahwa modal sosial (Social Capital) merupakan tempat meleburnya kepercayaan dan faktor yang sangat penting bagi kesehatan ekonomi sebuah negara. Maka selain hanya berfokus pada pembentukan modal pembangunan dan modal manusia, aspek-aspek kebudayaan lokal dan struktur sosial, serta sikap religius dirasa cukup perlu untuk menjadi bumbu pelengkap yang makin menjadikan suguhan pembangunan semakin lezat. Karena sikap keberpihakan terhadap kelompok-kelompok miskin (pro-poor) itu sendiri merupakan sikap yang muncul sebagai sikap sosial seseorang. Maka konteks dari sebuah pembangunan tidak hanya harus berfokus pada pembangunan yang bersifat materi tapi perlu juga konsen pada hal-hal yang bersifat sosio-budaya.

Metode

Sifat penelitian ini adalah penelitian policy (*policy research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada, atau analisa terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. *Policy research* ini sangat relevan bagi perencanaan dan perencanaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh *Pro-Poor Budget* terhadap tingkat IPM Provinsi Banten dan untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat. Maka penulis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan studi analisis regresi linier berganda. Selain itu penulis juga melakukan beberapa metode perhitungan sebagai berikut:

Menghitung Sebaran Anggaran

Teknik ini membantu untuk menentukan berapa besar prioritas pemerintah dalam anggaran setiap tahun anggaran. Teknik ini membuat perbedaan berapa belanja setiap prioritas tersebut dengan membandingkan alokasi antar departemen atau program dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Alokasi Dana Pos Anggaran Tertentu}}{\text{Total Anggaran}} \times 100$$

Mengubah Alokasi Anggaran Dari Hitungan Nominal ke Hitungan Riil

Dalam teknik ini digunakan term nominal dan riil untuk membedakan antara nilai uang dan nilai daya beli (*purchasing power value*). Dengan analisis ini, tidak lagi membandingkan hitungan nominal tiap tahun karena tidak merefleksikan nilai daya beli yang berubah tiap tahun. Jika anggaran mengalami kenaikan tanpa memperhitungkan inflasi, itu bukan kenaikan dalam makna sebenarnya. Maka anggaran harus diubah kedalam hitungan riil. Efek inflasi dapat diganti dengan membagi hitungan nominal dengan deflator.

Deflator sendiri merupakan rasio berapa besar harga umum mengalami kenaikan.

Rumusan untuk menghitung deflator adalah:

$$\text{Deflator Tahun Ini} = \frac{(\text{Deflator Tahun Lalu}) \times (1 + \text{Tingkat Inflasi Tahun ini})}{100}$$

Sedangkan rumusan untuk mengubah nilai nominal menjadi nilai riil adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Riil} = \frac{\text{Nilai Nominal}}{\text{Deflator}}$$

Menghitung Tingkat Pertumbuhan Riil

Teknik ini digunakan untuk menghitung apakah ada kenaikan atau penurunan tingkat pertumbuhan anggaran dari tahun fiskal ke tahun fiskal berikutnya. Hitungan riil harus dipakai untuk menghitung tingkat pertumbuhan riil. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan riil, bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Riil} = \frac{(\text{Hitungan Riil Tahun 2} - \text{Hitungan Riil Tahun 1})}{\text{Hitungan Riil Tahun 1}} \times 100$$

Hasil

Semua data yang data yang digunakan dalam analisis adalah data sekunder deret waktu (*time series*) mulai dari tahun 2009-2012 yang diperoleh dari data APBD Provinsi Banten. Data angka belanja langsung baik belanja kesehatan maupun pendidikan merupakan hitungan riil yang kemudian diolah menggunakan SPSS.

Analisis Regresi Berganda

Tujuan dilakukan pengujian hipotesis terhadap penerapan metode regresi linier berganda adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan antara belanja langsung Pendidikan (X1) dan belanja langsung Kesehatan (X2) terhadap tingkat pertumbuhan IPM (Y).

Berdasarkan tabel *coefficients* di atas menunjukkan bahwa model persamaan regresi berganda untuk memperkirakan peningkatan IPM yang dipengaruhi oleh belanja langsung pendidikan dan kesehatan adalah:

$$Y = 0,038 + -0,002 X_1 + -0,003 X_2 + e_t$$

Dari persamaan di atas dapat dianalisis beberapa hal antara lain:

Tingkat IPM, jika tanpa adanya belanja langsung program Pendidikan (X1) dan Kesehatan (X2) maka tingkat pertumbuhan riil IPM hanya akan bernilai 0,03, sedang bila setiap kenaikan sebesar 1% dalam belanja langsung pendidikan dan kesehatan maka tingkat IPM akan naik sebesar :

$$\begin{aligned} Y &= 0,038 + -0,002 X_1 + -0,003 X_2 \\ &= 0,038 + -0,002 (1) + -0,003(1) = 0,033 \end{aligned}$$

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Penulis melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini data dianggap normal jika nilai signifikan >0,05. Berdasarkan gambar di atas nilai signifikan masing-masing variabel adalah 0,193 untuk pendidikan dan 0,511 untuk kesehatan atau bernilai lebih besar dari 0,05.

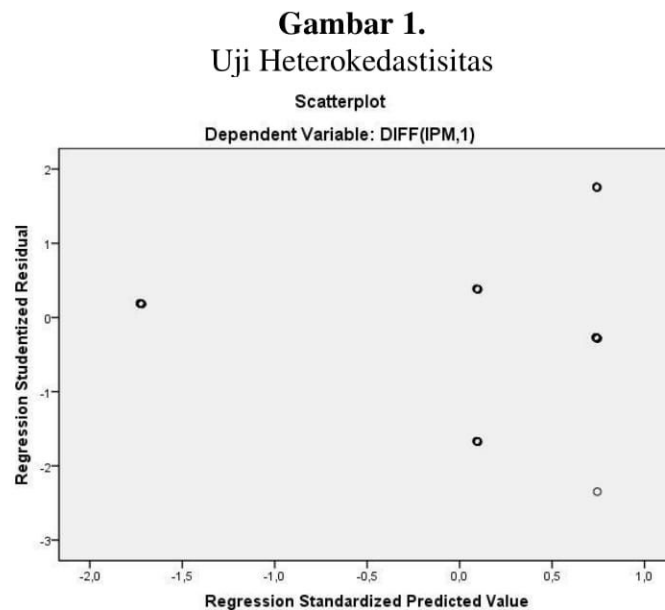
Hasilnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PENDIDIKAN	KESEHATAN
N		48	48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	15,7450	15,0792
	Std. Deviation	12,91666	10,23664
Most Extreme Differences	Absolute	,156	,118
	Positive	,156	,118
	Negative	-,131	-,075
Kolmogorov-Smirnov Z		1,081	,820
Asymp. Sig. (2-tailed)		,193	,511

Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Terlihat grafik *Scatterplot* di atas terlihat bahwa titik menyebar secara acak baik di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menyimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas model regresi. Maka data yang digunakan memenuhi syarat untuk dilakukan regresi berganda.

Uji Autokorelasi

Pada uji ini nilai Durbin Watson (DW) harus lebih besar dari 2 dan tidak melebihi nilai 4. Sedangkan nilai DW pada hasil pengujian data terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,711 ^a	,505	,483	,00502	2,203

a. Predictors: (Constant), DIFF(KESEHATAN,1), DIFF(PENDIDIKAN,1)

b. Dependent Variable: DIFF(IPM,1)

Dari tampilan out-put SPSS menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,203 yang berarti variabel bebas tidak terdapat autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator adalah 10, ada tidaknya multikoreliniaritas diantara variabel bebas nilai VIF harus lebih kecil dari 10.

Tabel 3.
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	ig.	Collinearity Statistics	
		Std. Error	Beta			Tolerance	IF
(Constant)		,001		50,873			
DIFF(PENDIDIKAN,1)	38	,000	-,533	-	000	,770	
DIFF(KESEHATAN,1)	,002	,000	-,790	4,406	000		,298
	,003	,000		6,528	000	,770	,298

a. Dependent Variable: DIFF(IPM,1)

Dari tabel output hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS terlihat bahwa nilai VIF pertumbuhan riil belanja pendidikan dan kesehatan sama-sama bernilai 1,298 sedangkan nilai tolerancinya 0,770. Karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 1 hal ini menunjukkan tidak adanya gejala multikoreliniaritas.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (T)

Berdasarkan uji t Belanja Langsung Pendidikan memiliki nilai signifikansi (sig) 0,000 derajat signifikansi 0,05 yang berarti $0,00 < 0,05$. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja langsung Pendidikan (X1) terhadap variabel IPM (Y).

Pada variabel Belanja Langsung Kesehatan memiliki nilai signifikansi (sig) 0,000 pada derajat signifikansi 0,05 yang berarti $0,000 > 0,05$ atau terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Langsung Kesehatan (X2) terhadap variabel terikat IPM (Y).

Uji Simultan (F)

Hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 22,366 dengan taraf signifikan (sig) 0,000. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Hal ini membuktikan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Belanja Langsung Pendidikan dan Kesehatan terhadap tingkat pertumbuhan IPM.

Pembahasan

Alokasi APBD Banten untuk Pro-Poor Budget

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis Perda tentang perubahan APBD Provinsi Banten sebaran anggaran selama tahun anggaran 2009 sampai 2012 atas Belanja Langsung Pendidikan dan Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.

Alokasi Belanja Langsung Pendidikan dan Kesehatan
Terhadap Total Belanja Daerah

DATA SEBARAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG ATAS DASAR BELANJA DAERAH		
TAHUN	PENDIDIKAN (%)	KESEHATAN (%)
2008	4,18	5,42
2009	4,25	7,27
2010	5,53	7,19
2011	4,45	6,37
2012	3,79	4,46

Berdasarkan data diatas, dari alokasi keseluruhan anggaran belanja daerah Pemprov Banten yang sebelumnya sejak tahun 2008 hingga 2010 anggaran Belanja

Langsung Pendidikan yang mengalami peningkatan, dimulai sejak tahun 2011 hingga 2012 kembali mengalami penurunan porsi alokasi. Bahkan anggaran Belanja Langsung Kesehatan sudah mengalami penurunan sejak Tahun 2010 atas total Belanja Daerah.

Jika ditinjau dari pertumbuhan riil alokasi Belanja Langsung Pendidikan dan Kesehatan, pertumbuhan tertinggi dari alokasi Belanja Langsung Pendidikan terjadi pada tahun 2010 yang mencapai angka pertumbuhan sebesar 45,15% atau secara nominal sebesar Rp.57.461.632.470,00. Sedangkan pada pertumbuhan riil alokasi Belanja Langsung Kesehatan pertumbuhan tertinggi adalah di tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 16,32% atau secara nominal riil sebesar Rp.43.495.526.000,00. Sementara untuk Pertumbuhan riil dan perubahan nominal riil pertahun dapat diketahui melalui tabel 5 dan tabel 6 berikut ini:

Tabel 5.

Data Pertumbuhan Riil
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pendidikan & Kesehatan

PERTUMBUHAN RIIL		
TAHUN	PENDIDIKAN (%)	KESEHATAN (%)
2008		
2009	3,82	36,78
2010	45,15	10,42
2011	5,57	16,32
2012	14,74	-5,91

Tabel 6.

Data Perubahan Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pendidikan dan Kesehatan Atas Dasar Nominal Riil

TAHUN	PERUBAHAN ANGGARAN (NOMINAL RIIL)	
	PENDIDIKAN	KESEHATAN
2008		
2009	Rp 7.182.406.867	Rp 53.577.343.174,00
2010	Rp 57.461.632.470	Rp 30.780.480.475,00
2011	Rp 15.109.727.910	Rp 43.495.526.000,00
2012	Rp 34.732.999.667	Rp (5.590.000.000,00)

Meski secara nominal alokasi anggaran Belanja Langsung Kesehatan lebih besar dibandingkan dengan kesehatan namun secara pertumbuhan alokasi anggaran Belanja Langsung Pendidikan jauh lebih stabil perubahannya dibandingkan dengan anggaran Belanja Langsung Kesehatan yang pada tahun 2012 mengalami penurunan drastis sebesar 5,1% atau secara nominal berkurang sebesar Rp.5.590.000.000,00.

Dengan menganalisa pertumbuhan riil dan perubahan nominal riil pada Alokasi Belanja Langsung Pendidikan dan Belanja Langsung Kesehatan, terlihat bahwa arah kebijakan penggunaan APBD Pemprov Banten masih belum *pro-poor*. Sedangkan alokasi *pro-poor* berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sehingga untuk meningkatkan

taraf kesejahteraan sosial masyarakat Banten perlu adanya peningkatan belanja publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pro-Poor Budget dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah

Sejak awal dalam pengelolaan baitul maal Rasulullah s.a.w hanya mencontohkan mengenai fungsi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan shodaqah. Yang menjadi prioritas utama Rasulullah s.a.w adalah faqir miskin. Meski pada masa pemerintahan beliau kinerja baitul maal masih sangat sederhana, dengan pendapatan sebesar apapun yang diterima oleh baitul maal pada saat itu akan segera didistribusikan kembali kepada delapan golongan yang berhak. Hingga tiba pada masa pemerintahan khalifah Ummar bin Khattab baitul maal lebih memiliki pola pengelolaan anggaran yang lebih tertata dan mengalami penyempurnaan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dimana beliau menunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai pengelola keuangan negara.

Konteks penganggaran dalam Islam memang memiliki batasan-batasan tertentu, semisal dana zakat penyalurannya hanya akan dialokasikan pada delapan golongan mustahiq zakat dan tidak akan pernah digunakan untuk keperluan lain meski untuk membiayai perang dalam rangka perluasan wilayah dakwah Islam. Dengan kata lain Islam memiliki aturan yang ketat dalam alokasi penganggaran keuangan.

Secara rumusan, menurut Pusat Pengkajian dan Pengembang Ekonomi Islam (LP3EI) Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta konsep sumber penerimaan publik terdiri atas zakat, dharibah, aset dan sedekah. Sedangkan untuk sektor pengeluaran mengutamakan pengentasan kemiskinan, disusul kemudian oleh pengeluaran rutin, pembangunan, dan pengeluaran yang bersifat emergensi. Dengan kata lain segala urusan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan (*pro-poor*) menurut syariat Islam merupakan sektor pengeluaran yang harus di utamakan. Meski memang konsep penganggaran masih bersifat normatif namun sudah sejak dulu pengentasan kemiskinan dan pengembangan pengetahuan merupakan sektor utama bagi pengeluaran keuangan negara. Pengentasan kemiskinan selalu menjadi fokus utama konsep keuangan publik pemerintahan Islam sejak dahulu.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh alokasi pro-poor budget terhadap indeks pembangunan manusia provinsi Banten ditinjau dari ekonomi syariah, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap dokumen pelaporan mengenai perda tentang perubahan APBD provinsi Banten tahun anggaran 2009-2012. porsproporsi belanja tersebut mencerminkan bahwa kebijakan pengelolaan anggaran Pemprov Banten masih belum pro-poor budget. Dikarenakan baik alokasi Belanja Langsung Pendidikan dan Belanja Langsung Kesehatan masih mendapatkan porsi yang sangat minim, terutama Belanja Langsung Pendidikan rata-rata masih berada dibawah 10% dari total Belanja Daerah, sedangkan menurut Undang-Undang bahwa besarnya alokasi Belanja Pendidikan minimal 20% dari total belanja.

Berdasarkan pengujian data secara statistik melalui analisis regresi linier berganda secara parsial (uji t) dan simultan (uji F) Belanja Langsung Pendidikan dan Kesehatan taraf signifikansi sebesar 0,000 atau sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM.

Berdasarkan pengujian data secara statistik melalui analisis regresi linier berganda secara simultan, nilai korelasi (R) yang diperoleh sebesar $r = 0,483$ yang berarti kontribusi atau pengaruh yang diberikan belanja langsung pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat IPM provinsi Banten sebesar 48%

Referensi

- Badruzaman, Abad. (2008). *Teologi Kaum Tertindas, Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Ke-Indonesiaan*. Pustaka Pelajar. Cetakan Kedua.
- Daryanto, Arief dan Hafizrianda, Yundy. (2010). *Analisis Input-Output & Social Accounting Matrix, Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah*. IPB Press.
- Fukuyama, Francis. (2010). *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Penerbit Qalam. Cetakan kedua.
- Manan, Addul dan Maftuchan, Ah. (2010). *Anggaran Pro Rakyat Miskin*. Perkumpulan Prakarsa.
- Prasetyo, Eko (2002). *Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan*. Insist Press.
- Yuli, Sri Budi Cantika. (2013). Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika Bisnis*. 4(2).
www.bi.go.id
www.bps.banten.org